

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan penulis akan menjelaskan terkait beberapa hal seperti latar belakang yang berisi permasalahan utama atau fenomena permasalahan serius yang sedang terjadi akhir-akhir ini guna untuk menunjang penelitian. Selain itu, penulis akan menciptakan rumusan masalah guna untuk pengungkapan dari latar belakang suatu fenomena yang penulis temukan guna untuk memecahkan masalah permasalahan secara ilmiah. Selanjutnya terdapat tujuan dan kegunaan penelitian dimana tujuan tersebut berisi terkait jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini yang telah diuraikan, sedangkan kegunaan penelitian yakni untuk menjelaskan terkait manfaat penelitian yang dilakukan yang dilakukan di berbagai bidang ilmu. Pada bagian akhir, penulis membahas terkait sistematika penulisan guna untuk menjelaskan isi materisi dari setia bab. Berikut penjelasan dari masing-masing sub bab secara terperinci.

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini terdapat berbagai kasus dan kecurangan akuntansi, khususnya terkait manipulasi laporan keuangan. Terdapat sepuluh kasus manipulasi laporan keuangan yang paling terkenal dalam sejarah dunia yaitu Lehman Brothers, Saytam, Enron, Perjanjian Utrecht, WorldCom, General Electric, Tyco, American International Group Inc. (AIG) dan Waste Management (kledo, 27 Januari 2023). Isu-isu pelaporan keuangan telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa kasus di

Indonesia. Kasus manipulasi pelaporan keuangan di Indonesia terjadi pada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di Indonesia masih terdapat banyak fenomena yang menunjukkan belum optimalnya kinerja BUMN (Ningsih *et. al.*, 2019). Berikut kasus kinerja BUMN tanggal 24 April 2019 yakni pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dua komisaris PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) atas nama Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menyampaikan keberatan atas penyampaian laporan keuangan maskapai. Kedua komisaris tersebut melakukan penolakan dikarenakan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) telah menyatakan laba bersih, namun pada realitanya adalah pada tahun 2017 perusahaan tersebut mengalami kerugian. Hal tersebut telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Mahkamah Agung (MA). PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menerima putusan bersalah serta perlu memperbaiki kerugian Rp 2,4 triliun pada laporan keuangan tahun 2018 (Liputan6.com, 2019).

Selanjutnya, terdapat permasalahan manipulasi keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2022. Dugaan manipulasi laporan keuangan tersebut adalah pada PT Waskita Karya Tbk (Waskita) dan PT Wijaya Karya Tbk (Wika). Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah di *publish* oleh PT Waskita Karya Tbk (Waskita) pada tahun 2022 menyatakan, pendapatan usaha perseroan naik sedangkan kerugian tahun berjalan turun. Selain itu, laporan keuangan konsolidasian pada PT Wijaya Karya Tbk (Wika) mengalami pendapat

bersih naik, tetapi angka perseroan mengalami kerugian. Keterangan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel gambar di bawah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Laporan Konsolidasian PT Waskita dan PT Wika tahun 2021-2022

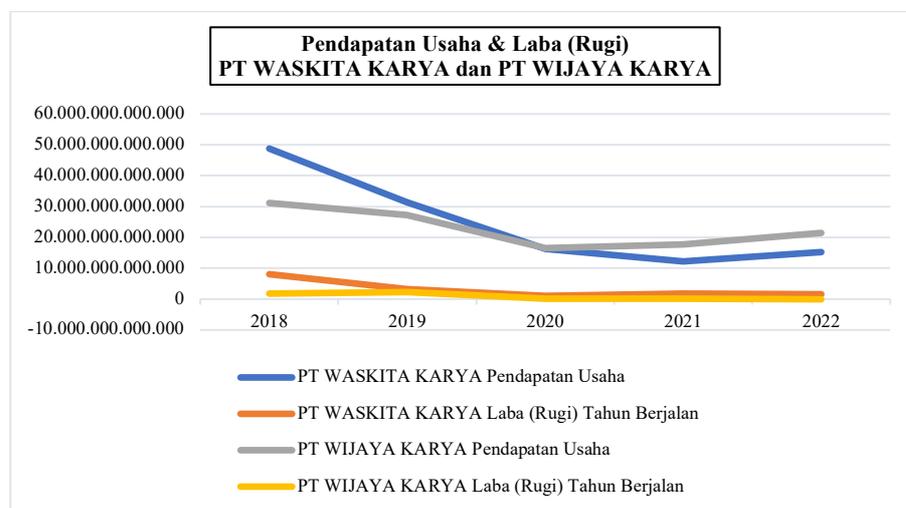
Keterangan	PT Waskita Karya Tbk (Waskita)		PT Wijaya Karya Tbk (Wika)	
	2021	2022	2021	2022
Pendapatan Usaha	Rp 12,22 T	Rp 15,30 T	Rp 17,80 T	Rp 21,48 T
Laba/rugi	Rp 1,83 T (rugi)	Rp 1,67 T (rugi)	Rp 117,67 M (laba)	Rp 59,6 M (rugi)

Sumber : tirta.id, olahan data (2023)

Tabel di atas menjelaskan pendapatan usaha PT Waskita pada tahun 2021 senilai Rp 12,22 triliun kemudian pada tahun 2022 senilai Rp 15,30 triliun, artinya mengalami kenaikan sebesar 25,20%. Sedangkan kerugian tahun berjalan PT Waskita mengalami penurunan sebesar 8,74% yakni pada tahun 2021 senilai Rp 1,83 triliun dan pada tahun 2022 senilai Rp 1,67 triliun. Selanjutnya PT Wika mengalami pencatatan kenaikan pendapatan usaha sebesar 20,67% yakni pada tahun 2021 senilai Rp 17.80 triliun sedangkan pada tahun 2022 pendapatan usahanya mengalami kenaikan senilai Rp 21,48 triliun. Selain itu, terdapat hal rancu dimana PT Wika melakukan pencatatan rugi bersih konsolidasian pada tahun 2022 senilai RP 59, 6 miliar dibandingkan pada tahun 2021 justru mengalami pencatatan

laba bersih senilai Rp 117,67 miliar. Wakil Menteri BUMN II Kartika melontarkan dugaan terkait manipulasi keuangan yang dilakukan oleh dua BUMN karya tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil. Kondisi laporan keuangan dua BUMN karya tersebut pasalnya dikatakan selalu untung, namun realita yang ada pada perusahaan terkait *cashflow* nya tidak pernah mengalami positif (cnnindonesia.com). Sehingga, kenaikan dan penurunan pendapatan usaha serta laba rugi PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya periode 2018-2022 dapat ditampilkan melalui gambar grafik sebagai berikut :

Gambar 1. 1
Grafik Pendapatan Usaha dan Laba (Rugi)
PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya Periode 2018-2022



Sumber : Annual Report PT Waskita & PT Wika, olahan data (2023)

Isu-isu manipulasi tersebut dapat terjadi salah satunya dengan dilatarbelakangi oleh sistem pengelolaan perusahaan yang terbelang masih rapuh. Kasus yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, nepotisme dan penggelembungan

pendapatan dapat diatasi dengan menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan. Namun pada realitanya terdapat banyak perusahaan yang masih kurang memperhatikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Walaupun pemerintah sedang gencarnya untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), namun kenyataannya masih terdapat beberapa perusahaan BUMN yang menghiraukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) (Titania, H., & Taqwa, S., 2023).

Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada negara-negara di Asia tergolong masih lemah, hal ini dikarenakan adanya kondisi objektif yang cenderung setara, salah satunya adalah munculnya hubungan yang kuat antara pemerintah dan pelaku bisnis, konglomerasi dan monopoli serta intervensi pasar. Dengan munculnya fenomena tersebut, perusahaan di Indonesia cenderung belum dapat menerapkan tata kelola yang baik bagi perusahaan dikarenakan terdapat faktor penghambat dalam mengimplementasikan *corporate governance*. Terdapat dua faktor aspek hambatan diantaranya adalah aspek ketidakseimbangan internal dan eksternal dalam mengimplementasi *corporate governance* pada suatu perusahaan.

Ketidakseimbangan internal dalam praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dapat merugikan perusahaan dan pemegang saham. Hal ini mengarah pada praktik yang tidak transparan, tidak berkelanjutan, dan tidak adil. Salah satu contoh seperti, dewan direksi dan manajemen yang terlalu fokus dalam pencapaian target jangka pendek kinerja keuangan tanpa memperkirakan jangka panjang. Sehingga, pemegang saham merasa dirugikan oleh perusahaan terkait dan dampaknya dapat merusak kepercayaan.

Faktor lain dalam praktik *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu Ketidakseimbangan eksternal. Hal ini, hubungannya antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal, seperti lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu contoh ketidakseimbangan eksternal yaitu, perusahaan yang memiliki informasi penting terkait kegiatan operasional dan dampaknya kepada lingkungan namun dirahasiakan. Selanjutnya, untuk meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan internal dan eksternal dalam *Good Corporate Governance* (GCG), maka perusahaan perlu memahami dan mengelola risiko internal ataupun eksternal perusahaan, memahami dan menerapkan standar dan praktik berkelanjutan dan memperkuat keterlibatan antar pemangku kepentingan baik internal ataupun eksternal perusahaan.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) guna memperbaiki kinerja keuangan adalah dengan mewajibkan penerapan *corporate governance* secara konsisten pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) praktik seperti pemalsuan catatan, penyalahgunaan metode akuntansi, serta penggelapan dana untuk kepentingan pribadi dapat diminimalisir oleh perusahaan. Selain itu, *Good Corporate Governance* (GCG) mampu menciptakan citra baik bagi badan usaha dikarenakan *stakeholders* lebih mampu mempercayai kinerja perusahaan.

Lembaga internasional *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) menyatakan hasil survei atas praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2020 Indonesia memperoleh nilai sebesar 33,6% yang artinya menempati posisi terakhir sehingga perlu dibenahi guna upaya dalam memperbaiki suatu perusahaan (Fajri, F., & Mariadi, Y., 2023). Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas, maka berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 terdapat lima prinsip yang perlu diperhatikan serta diterapkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Menurut penelitian Saifi, M. (2019) menyatakan perusahaan perlu menjadikan lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis serta meningkatkan kemakmuran, yakni Keadilan (*Fairness*), Transparansi (*Transparency*), Kemandirian (*Independency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Pertanggungjawaban (*Responsibility*).

Menurut Yualiyanti, A., & Cahyonowati, N. (2023) menyatakan, tolak ukur yang dipergunakan dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan pada jangka waktu tertentu adalah dengan melihat kecukupan modal, likuiditas, serta pendapatan. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh investor dalam menggali informasi guna mempertimbangkan hal dari keputusan modal guna untuk diinvestasikan. Modal awal bagi perusahaan salah satunya dengan kinerja keuangan yang baik, hal tersebut berdampak bagi kepercayaan investor terkait kesesuaian harapan salah satunya seperti dana yang akan diinvestasikan akan memberikan *return*.

Fungsi pengukuran kinerja keuangan adalah sebagai alat bantu manajemen untuk mengambil keputusan dan memberikan informasi kepada investor, debitur, serta pihak lainnya yang memiliki kepentingan bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik. Selain itu, tujuan pengukuran kinerja keuangan adalah mengupayakan perusahaan agar dapat mengendalikan aktivitas kegiatannya dengan harapan perusahaan sejenis mampu berkompetisi (Yuliyanti, A., & Cahyonowati, N., 2023). Kinerja keuangan merupakan suatu kondisi gambaran yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, dengan demikian kondisi keuangan suatu perusahaan secara baik ataupun buruk mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu dari kinerja perusahaan.

Secara umum, untuk mengetahui baik buruknya perusahaan dapat diukur melalui rasio keuangan, salah satunya dengan *Return On Assets (ROA)*. *Return On Assets (ROA)* merupakan rasio yang digunakan perusahaan berdasarkan tingkat aset tertentu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih (Khamisah, N., *et all.*, 2020). Selain itu, rasio tersebut dapat menggambarkan keseluruhan aktivitas di perusahaan, sehingga dapat memperlihatkan seberapa efektif pembelanjaan modal untuk aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, pengukuran rasio ini dapat sebagai bahan evaluasi perusahaan untuk meningkatkan pengembalian investasi aset dengan cara pembenahan operasional.

Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik secara tidak langsung mendukung kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Dengan demikian, menciptakan hal banyak positif bagi suatu perusahaan. Kinerja bisnis perusahaan secara finansial

tentunya dipengaruhi oleh beberapa elemen *corporate governance*. Dalam hal tersebut, tata kelola perusahaan yang baik dalam mengambil sebuah keputusan harus berdasarkan dengan keputusan strategis sesuai dengan informasi serta proses yang objektif.

Komponen utama pelaksanaan pengelolaan perusahaan berasal dari dewan direksi. Terdapat pengaruh positif dewan direksi terhadap kinerja keuangan (Khoirunnisa & Karina, 2021). Menurut Fajri, F., & Mariadi, Y. (2022) tugas dewan direksi yakni mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, direksi bertugas pula dalam pengambilan keputusan secara optimal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan POJK Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan direksi merupakan organ organisasi yang memiliki otoritas serta bertanggung jawab penuh untuk mengelola organisasi guna untuk organisasi itu sendiri (Yuliyanti, A., & Cahyonowati, N., 2023).

Pelaksanaan *corporate governance* pada suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak selalu efektif. Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dapat ditunjukkan pula dengan dewan komisaris independen. Tugas komisaris independen adalah untuk memantau secara berkesinambungan terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam suatu perusahaan keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan kinerja manajemen sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (Hasibuan & Sushanty, 2018). Terdapat pengaruh positif dari ukuran komisaris independen hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat banyaknya opsi dalam pemecahan suatu

masalah sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan khususnya pada kinerja keuangan perusahaan. Hal ini senada dengan penelitian Agatha *et al* (2020) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen dapat mempengaruhi kinerja keuangan dengan meningkatnya dewan komisaris independen maka pekerja yang mengalami penurunan kinerja dapat diberikan sanksi.

Selain itu, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dibentuk dengan karakteristik dewan lainnya seperti komite audit. Peran penting komite audit dalam perusahaan adalah memastikan manajemen secara transparan dan akurat dalam menyajikan laporan keuangan dengan harapan dapat memperoleh informasi yang sempurna bagi pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya. Dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) organ pendukung kinerja keuangan perusahaan lainnya adalah komite audit (Pratiwi & Ratnaningsih, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Basuki (2020) dan Pradipto *et al* (2020) menyatakan bahwa dewan komite audit memiliki pengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan khususnya pada ukuran *Return on Asset* (ROA). Dengan semakin banyaknya anggota komite audit maka tindakan atau praktik manajemen laba dapat dihindari, sehingga mampu meningkatkan produktivitas *corporate governance* pada suatu perusahaan. Selain itu dapat menerapkan fungsi pengawasan yang efektif sehingga menjadi acuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan.

Selanjutnya, dengan adanya rapat dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Sehingga, dapat dijadikan sebagai sarana koordinasi dan komunikasi pada saat anggota dewan komisaris

melaksanakan tugas. Selain itu, pelaksanaan rapat dewan komisaris yang *intens* dapat dijadikan sebagai pengungkapan realita keadaan laporan keuangan pada perusahaan. Maka, hal ini tentunya dapat meminimalisir terjadinya permasalahan keuangan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi secepat mungkin pada suatu perusahaan.

Keberadaan penting antara manajemen dengan *stakeholder* pada perusahaan dapat dilihat melalui kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajemen atau direktur perusahaan, hal ini persentase sahamnya diukur dengan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dibentuk dengan tujuan agar dapat mengantisipasi *opportunistic* perilaku dari manajemen yang dapat merugikan pemegang saham suatu perusahaan (Rahman, 2019). Penelitian ini sejalan dengan Sari *et al.*, (2020) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mampu mengurangi permasalahan keagenan dengan cara meningkatkan kepemilikan manajerial serta berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Pada dasarnya jikalau manajer memiliki kepemilikan saham dengan nilai yang tinggi, maka dengan upaya peningkatan kinerja perusahaan yang dilaksanakan oleh manager akan berjalan lebih produktif.

Tingginya tingkat kepemilikan institusional akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional kepada perusahaan sehingga menghalangi perilaku manajer terkait kecurangan seperti merugikan pemilik perusahaan dengan melakukan kepentingannya sendiri. Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Suryanto & Refianto (2019) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional yang diukur dengan *Good Corporate Governance* (GCG)

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, jikalau nilai saham dari kepemilikan institusional tinggi maka pengawasan terhadap perusahaan dapat ditingkatkan oleh berbagai institusi, dengan demikian maka tindakan yang bersifat curang dapat dihindari oleh pihak manajemen (Agatha *et al.*, 2020). Dengan hal ini, sejalan dengan teori pada investor institusi yang mengawasi dengan teliti terkait potensi kecurangan yakni dalam investasi yang berlangsung pada suatu perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah dapat berupa kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung yang dikendalikan langsung oleh pemerintah melalui suatu entitas. Selain itu, dengan adanya kepemilikan pemerintah maka menimbulkan sebuah pengawasan terhadap manajemen yang diambil oleh manajer guna untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sesuai dengan keinginan para *principal*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah diteliti oleh Margaret, E., & Daljono, D. (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan saham yang semakin besar yang dimiliki oleh pemerintah maka mampu meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tugas dewan komisaris adalah wajib mengadakan rapat setidaknya satu kali dalam dua bulan. Selain itu, dewan komisaris wajib mengadakan rapat bersama secara berkala setidaknya satu kali dalam empat bulan dengan dewan direksi. Fungsi rapat dewan komisaris adalah sebagai sarana komunikasi dan koordinasi

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas manajemen antar anggota dewan komisaris. Dengan kerap diadakannya rapat dewan komisaris, maka akses informasi akan semakin merata antar sesama komisaris, sehingga berdampak baik pada kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Susmanto, A., Daryanto, A., & Sasongko, H. (2021). menyatakan rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sehingga, diharapkan dengan adanya rapat dewan komisaris secara sering maka pengawasan dalam perusahaan menjadi semakin baik (Kasandra, 2020). Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, D., & Dewayanto, T. (2019) menyatakan variabel frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja.

Pada penelitian ini terdapat *research gap* di mana hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Margaret, E., & Daljono, D. (2023) mempergunakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) meliputi sektor keuangan, *basic material*, infrastruktur, energi, transportasi & *logistic*, dan kesehatan pada periode tahun 2018-2022. Penggunaan sampel perusahaan dari sektor keuangan dan non-keuangan dalam penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan perbandingan. Hal ini, dapat memberikan manfaat terutama pada saat menganalisis kebijakan, praktik, dan kinerja didalam kedua lingkungan yang berbeda. Sehingga, harapan penulis dengan adanya sektor yang berbeda dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang

aspek manajemen dan keuangan perusahaan, khususnya pada faktor regulasi, strategi bisnis dan ekonomi.

Selain itu, pada penelitian sebelumnya hanya terdapat enam variabel independen seperti dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah. Selanjutnya, peneliti menambahkan variabel independen seperti rapat dewan komisaris. Tujuan penambahan variabel independen pada penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dengan harapan dapat memberikan hasil terbaru pada kondisi saat ini menjadi penelitian yang lebih relevan.

Berdasarkan uraian di atas, pengaruh *Good Corporate Government* (GCG) terhadap kinerja keuangan (ROA) dalam perusahaan perlu dikaji lebih dalam lagi. Dengan demikian, maka penulis mengangkat topik terkait dengan judul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022).**

1.2 Rumusan Masalah

Di Indonesia masih terdapat banyak perusahaan yang belum mengimplementasikan tata kelola yang baik. Terdapat faktor internal dan eksternal dalam mencapai kinerja yang baik pada suatu perusahaan. Pada tiap perusahaan pastinya terdapat permasalahan terkait perbedaan kepentingan antar pemilik modal dan manajemen, dengan hal ini keberadaan *Good Corporate Governance* (GCG)

dapat menjadi solusi agar dapat menghindari terjadinya hal serupa. Peran *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan adalah untuk mengawasi serta mengoptimalkan pihak internal perusahaan dalam meminimalisir tindakan ilegal serta kecurangan. Hal ini, dengan tujuan agar perusahaan beroperasi berdasarkan kepatuhan hukum, berintegritas serta wajib memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam lingkup sosial.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan pada subbab sebelumnya, riset dilakukan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh mekanisme *corporate governance*. Pada penelitian sebelumnya pengukuran kinerja keuangan menggunakan *Return on Asset* (ROA) dengan variabel independen dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah. Selanjutnya, pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel berupa rapat dewan komisaris. Sehingga secara spesifik, penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
6. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
7. Apakah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2022. Selain itu, bagian kegunaan penelitian dijelaskan berdasarkan pengetahuan secara teoritis maupun praktis.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya :

1. Membuktikan pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2. Membuktikan pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Membuktikan pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

4. Membuktikan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan.
5. Membuktikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan.
6. Membuktikan pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kinerja keuangan perusahaan.
7. Membuktikan pengaruh rapat dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berdampak pada pengembangan ilmu dan teori. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian mengacu pada penelitian yang sebelumnya (Anggraini D, D., dkk, 2023:80). Penelitian ini memiliki manfaat teoritis sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi tentang pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap perusahaan, khususnya pada kinerja keuangan. Pada tiap perusahaan tentunya terdapat laporan keuangan, dengan demikian adanya *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat

menciptakan pengaruh positif seperti meningkatkan kualitas laporan tersebut.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi terbaru, tujuannya agar dapat memperluas pemahaman atas konsep maupun fenomena tertentu, terutama mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

a. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman terkait pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan.

b. Bagi Pihak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta masukan terkait mekanisme *corporate governance* perusahaan terkait serta menjadi tolak ukur perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja perusahaan.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan investor sebagai referensi dalam menentukan keputusan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan terkait.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai wawasan dan informasi tambahan jikalau ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan topik ini, khususnya topik Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan teori, yakni penjelasan tentang dasar penelitian yang diperlukan dalam pemecahan permasalahan pada penelitian sebelumnya serta dalam Tugas Akhir/Skripsi. Sumber dapat diambil dari buku, majalah, jurnal, internet maupun koran edisi terbaru. Tinjauan pustaka dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau

persamaan-persamaan yang berkaitan dengan permasalahan lalu dituangkan dalam bentuk kerangka berpikir serta rumusan hipotesis terkait.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi terkait definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. Tujuannya agar dapat dapat memecahkan masalah yang sedang diteliti.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan terkait kesimpulan, keterbatasan, dan saran.